

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

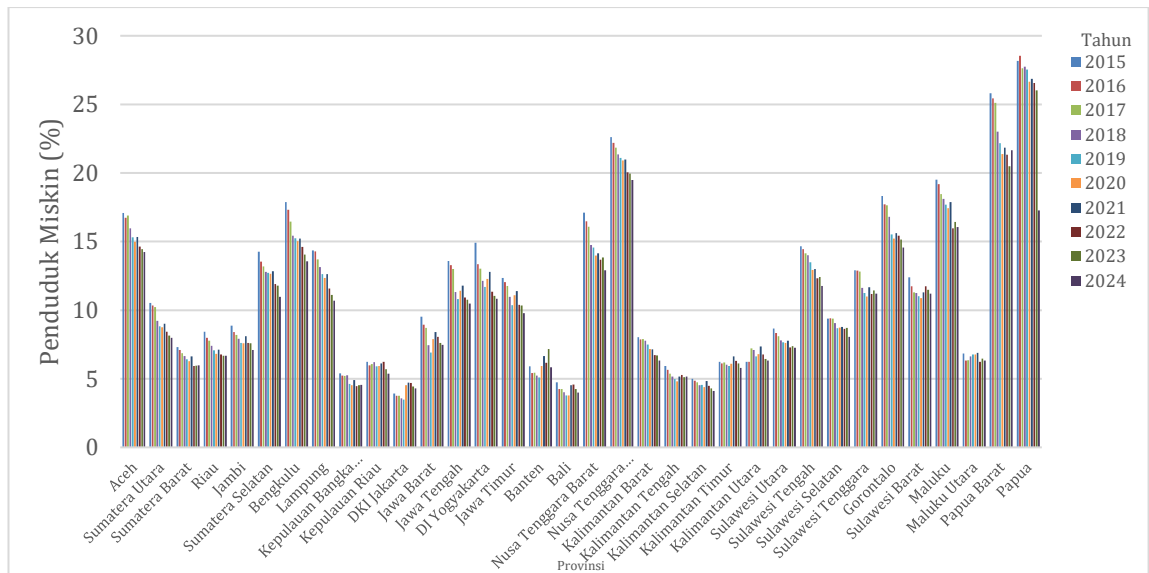
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan dasar yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam satu dekade terakhir, namun kemiskinan tetap menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesejahteraan sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mencapai standar hidup yang layak. Menurut Kause & Fithriyah (2024) kemiskinan harus dilihat sebagai fenomena multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan teknologi, sehingga pengentasannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor. Definisi tersebut sejalan dengan konsep kemiskinan yang dijelaskan oleh Pasarela & Juanda (2024), yaitu kondisi individu atau sekelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, produktivitas kerja, pendidikan, dan kesehatan yang layak .

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 283,5 juta jiwa, persoalan kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, dan teknologi. Kemiskinan mencerminkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Badan Pusat Statistik Penduduk & Maret (2024) mendefinisikan sebagai individu atau rumah tangga yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di

bawah batas garis kemiskinan. Dalam kajian ekonomi pembangunan, kemiskinan tidak terjadi secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Istilah determinan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi penentu atau yang mempengaruhi suatu fenomena tertentu. Menurut Triasmanto & Dewi (2019) determinan adalah faktor atau variabel yang menentukan suatu fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, determinan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penentu atau yang mempengaruhi suatu variabel dalam penelitian.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi dan tidak mudah diselesaikan karena berkaitan erat dengan berbagai faktor seperti pdrb, tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi. Dalam upaya menurunkan kemiskinan pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017 yang diintegrasikan menjadi program sembako pada tahun 2020. PKH berfungsi untuk mendorong peningkatan investasi dalam sumber daya manusia melalui pemberian bantuan bersyarat yang fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan BPNT membantu menjaga ketahanan pangan serta daya beli rumah tangga miskin (Kemensos RI, 2023), namun tingkat kemiskinan nasional belum sepenuhnya mampu ditekan secara merata di seluruh provinsi. Perbedaan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat dan hasil kebijakan antarwilayah. Nadhifah & Mustofa (2021) menemukan bahwa pelaksanaan PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional, namun dampaknya tidak merata antarwilayah. Faktor seperti kapasitas

ekonomi daerah, ketepatan sasaran bantuan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal menjadi penentu utama keberhasilan program tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Suwatri *et al.*, (2024), yang menunjukkan bahwa meskipun program BPNT telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, efektivitasnya berbeda antarprovinsi. Provinsi dengan infrastruktur dan sistem distribusi bantuan yang lebih baik cenderung memperoleh hasil yang lebih positif dibandingkan wilayah tertinggal yang menghadapi hambatan geografis dan logistik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

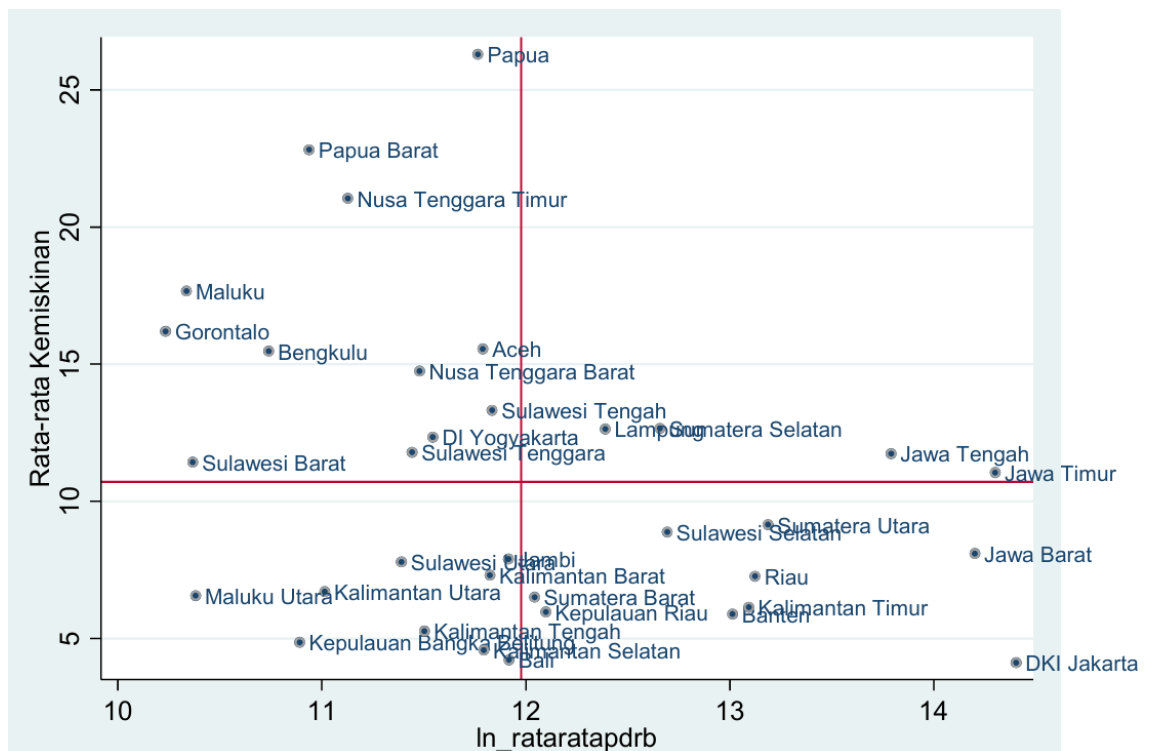
Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Indonesia Tahun 2015-2024

Menurut BPS (2024), tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Namun, angka tersebut masih menyimpan ketimpangan antardaerah. Pemerintah telah mencanangkan beberapa upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami

penurunan yang signifikan. Data yang dikeluarkan BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun dalam praktiknya belum ada perubahan yang nyata. Kondisi kemiskinan di Indonesia semakin memprihatinkan tiap tahunnya (Ramdani, 2015). Dalam teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, kemiskinan terjadi karena adanya hubungan yang saling memengaruhi antara rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, keterbatasan modal, dan rendahnya investasi. Lingkaran tersebut menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kondisi miskin karena keterbatasan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan memerlukan dukungan dari berbagai faktor pembangunan ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Gambar 1.1 diatas menunjukkan beberapa provinsi di wilayah Kawasan Timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional, sementara daerah seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Bali mencatat angka kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah yang signifikan. Perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, dan perkembangan teknologi antarwilayah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan nasional belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak hanya berbeda antarwilayah, tetapi juga menggambarkan adanya kesenjangan struktural yang cukup tajam antara wilayah barat dan timur

Indonesia. Kondisi ini mempertegas bahwa penurunan angka kemiskinan secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Faktor-faktor seperti rendahnya investasi, kurangnya konektivitas antarwilayah, dan disparitas kualitas sumber daya manusia turut memperdalam kesenjangan ini (Hidayat *et al.*, 2023).



Sumber: BPS Data diolah (2026)

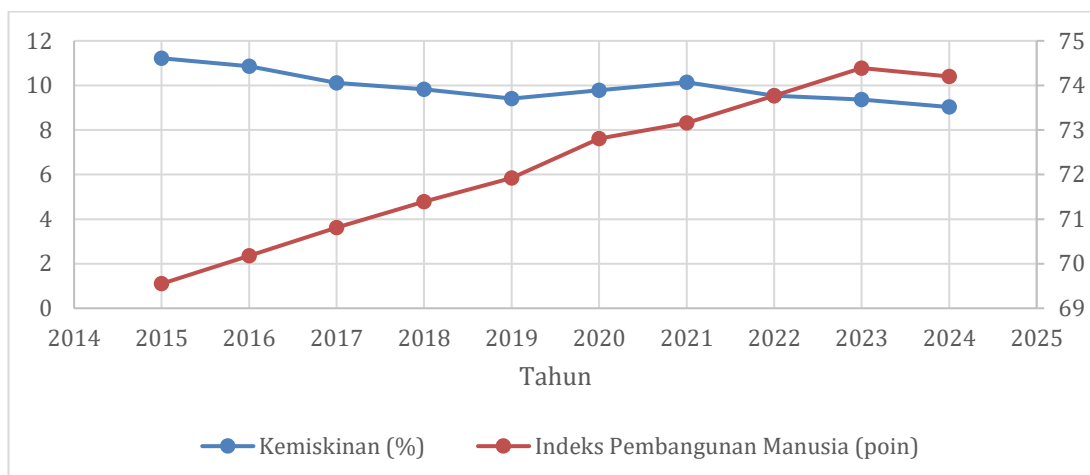
Gambar 1. 2 Diagram Kartesius Hubungan Rata-rata Tingkat Kemiskinan dan PDRB

Gambar 1.2 menunjukkan hubungan antara rata-rata tingkat kemiskinan dan Logaritma Natural rata-rata PDRB di 34 provinsi di Indonesia untuk menggambarkan kinerja penurunan tingkat kemiskinan secara spasial selama periode 10 tahun terakhir. Pada Kuadran I kanan atas, provinsi dengan perekonomian besar seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa

Tengah masih tertahan dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki perputaran ekonomi besar justru mengalami perlambatan dalam menurunkan tingkat kemiskinannya. Kondisi ini sangat timpang dibandingkan dengan wilayah di Kuadran IV kanan bawah seperti DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan sangat cepat jauh di bawah rata-rata nasional, ataupun dengan wilayah Kuadran III kiri bawah seperti Bali yang terbukti sangat efektif mencapai tingkat kemiskinan terendah di Indonesia meskipun kapasitas ekonomi daerahnya berada di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan kecepatan penurunan kemiskinan antar wilayah tersebut menjadi landasan utama mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Ketidakmampuan sumber daya manusia juga menjadi salah satu pemicu kemiskinan. Tanpa keahlian yang memadai, individu akan kesulitan mendapatkan penghasilan yang cukup, yang pada gilirannya mengurangi daya beli mereka dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau bahkan negara secara keseluruhan (Manihuruk & Suharianto, 2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil pembangunan ekonomi, salah satu aspek kunci yang terkait dengan tingkat pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas masyarakatnya (Agustin & Anto, 2020).

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2023, yaitu dari 69,55 menjadi 74,39 yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meskipun pada tahun 2024 IPM sedikit menurun menjadi 74,20 secara keseluruhan periode 2015-2024 menunjukkan kemajuan pembangunan manusia yang cukup stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun secara teoritis peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian Putri & Sihombing (2025) yang meneliti 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, Sihombing *et al.*, (2024) menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian Purboningtyas *et al.*, (2020) di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sementara itu, penelitian Novita *et al.*, (2026) di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.



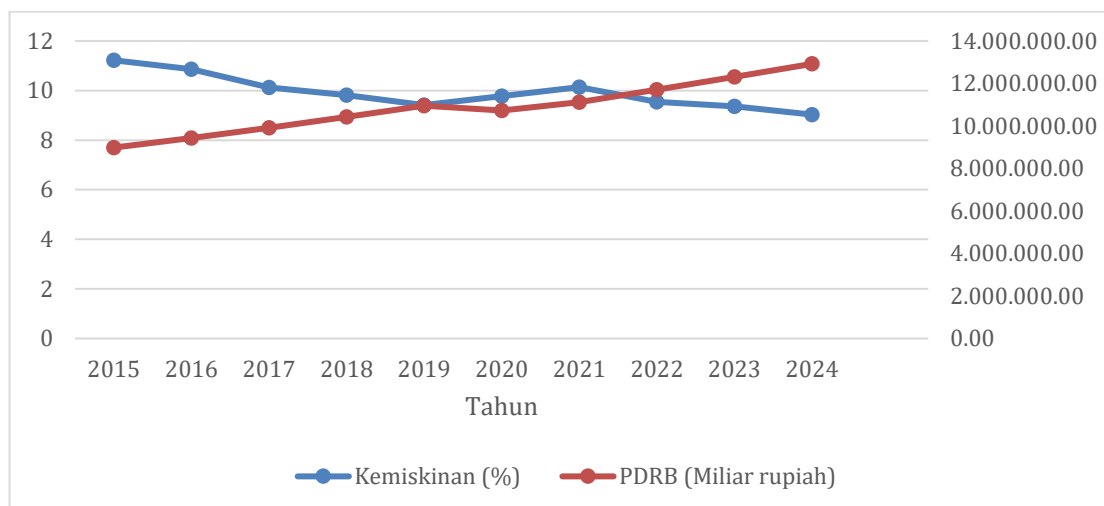
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi. Menurut Islamiah & Rasulong (2025) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan meningkat tanpa memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk, meskipun tingkat pertumbuhan penduduk yang sering kali dihubungkan dengan pembangunan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah kerap dicerminkan melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai keseluruhan nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah di dalam satu periode tertentu. Pencapaian PDRB yang semakin tinggi akan berimplikasi pada meningkatnya penerimaan suatu daerah, dan sebaliknya jika PDRB rendah berpotensi penerimaan daerah juga akan semakin kecil. Pencapaian PDRB juga dapat dilihat melalui dua cara yakni berdasarkan atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga konstan merupakan nilai tersebut diperoleh dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan Gambar 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) selama periode 2015-2024 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dalam menghasilkan barang dan jasa. Meningkatnya PDRB mengindikasikan bahwa produktivitas perekonomian nasional juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat juga diharapkan ikut meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, tingginya PDRB juga menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi suatu wilayah semakin baik dalam mendukung proses pembangunan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2020 PDRB Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami perlambatan. Setelah itu, PDRB kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mulai mengalami pemulihan pasca pandemi. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB Indonesia selama periode penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami perkembangan yang positif. Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya output barang dan jasa dalam jangka panjang. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Pasaribu (2023) di Pulau Sumatera menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Bintang & Woyanti (2018) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menemukan bahwa laju pertumbuhan PDRB justru memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan arah pengaruh ini menunjukkan bahwa dampak PDRB terhadap tingkat kemiskinan bersifat kondisional tergantung pada karakteristik dan distribusi pembangunan di masing-masing daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

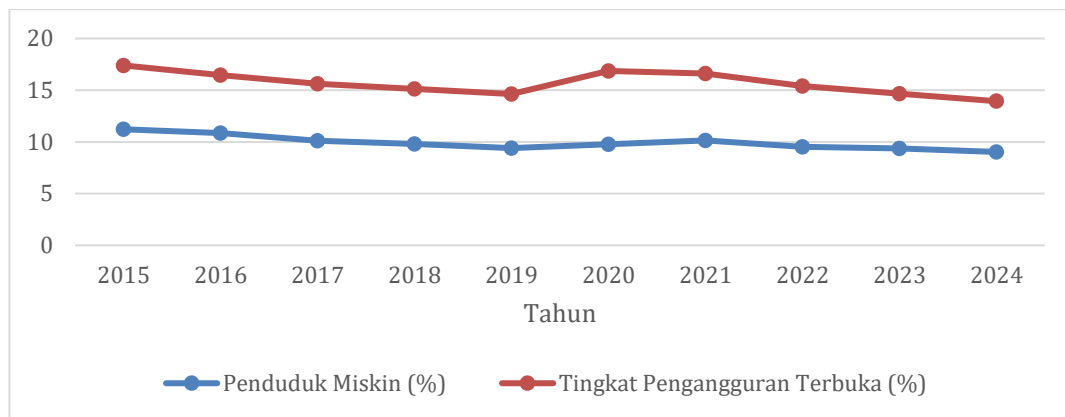
Gambar 1. 4 PDRB dan Tingkat Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Pengangguran terbuka muncul ketika pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi laju peningkatan angkatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya keberhasilan pembangunan, karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kapasitas lapangan kerja yang dapat diserap oleh perekonomian. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya

kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin Arsyad 2010, dalam (Febrianti *et al.*, 2022). Dalam teori Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat yang menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Tingginya pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun (Safitri *et al.*, 2025).

Berdasarkan Gambar 1.5, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren menurun dari 6,18 persen pada 2015 menjadi 4,91 persen pada 2024, menandakan perbaikan signifikan di pasar tenaga kerja. Meskipun sempat melonjak menjadi 7,07 persen pada 2020 akibat pandemi COVID-19, kondisi ini berhasil dipulihkan melalui pemulihan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor. Faturohim *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa pengangguran berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Indonesia, hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli serta produktivitas tenaga kerja. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Temuan Manihuruk & Suharianto (2024) menemukan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, Mukhtar & Saptono (2019) menunjukkan bahwa TPT negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil temuan Muna *et al.*, (2025) dan (Kifayatun *et al.*, 2025) yang menemukan bahwa TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara TPT dan kemiskinan masih memerlukan kajian lebih lanjut.



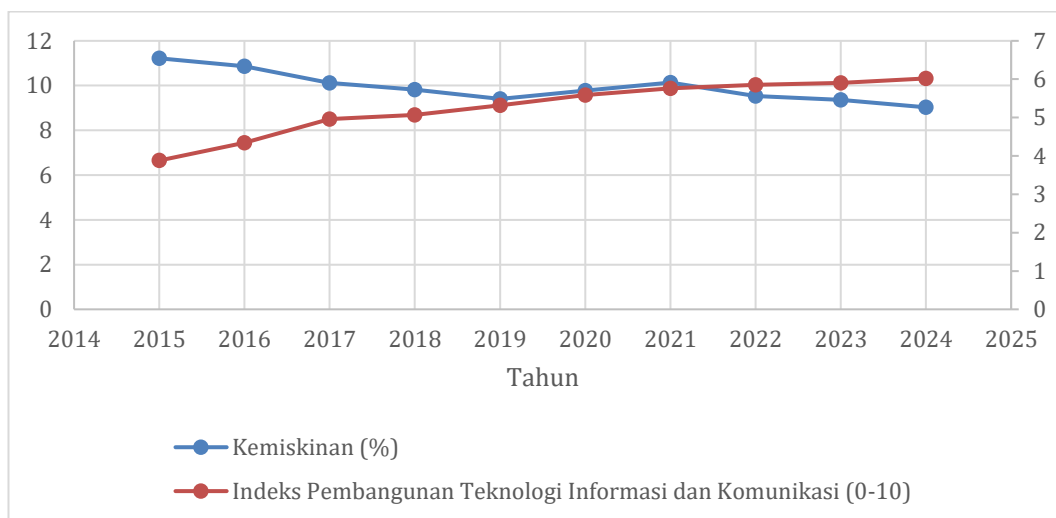
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Pemilihan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel dalam penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa TPT merepresentasikan kondisi riil dari angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*). Penggunaan data pengangguran terbuka jauh lebih relevan dalam analisis makroekonomi dibandingkan pengangguran murni (yang sudah berhenti mencari kerja), karena kelompok pengangguran terbuka ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) yang dinamis antara penawaran tenaga kerja produktif dan ketersediaan lapangan kerja di pasar sediaan daerah. Tingginya angka pengangguran terbuka di suatu wilayah mengindikasikan adanya pemborosan sumber daya manusia yang siap bekerja, yang secara langsung berdampak pada hilangnya potensi pendapatan masyarakat dan menjadi salah

satu faktor utama yang menghambat percepatan penurunan angka kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir.

Faktor lain adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Daerah dengan tingkat adopsi TIK yang tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pasar, pendidikan, dan layanan publik (World Bank, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kemajuan teknologi dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, mengakses pendidikan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan produktivitas kerja. Semakin tinggi tingkat perkembangan teknologi suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, kesenjangan digital antarprovinsi masih cukup besar, Sementara itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi dimensi baru yang semakin relevan dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2015-2024 Berdasarkan Tabel 1.5. Nilainya meningkat dari 3.88 pada 2015 menjadi 6.02 pada 2024, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam akses, penggunaan, dan keterampilan digital masyarakat. Kenaikan yang stabil setiap tahun menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital, perluasan jaringan internet, serta peningkatan literasi teknologi telah berjalan efektif. Pertumbuhan ini juga menggambarkan semakin pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Tetapi kenyataannya dapat dilihat bahwa penyebaran IP-TIK belum merata antar provinsi yang ada di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tingkat Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2024

Pemilihan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) ditekankan pada argumen bahwa indeks ini bersifat komprehensif, karena tidak hanya mengukur ketersediaan infrastruktur atau fasilitas fisik semata, melainkan juga mengukur intensitas penggunaan serta keahlian (*skills*) masyarakat dalam mengadopsi teknologi. Di era ekonomi digital, IP-TIK menjadi indikator krusial yang berkaitan langsung dengan efisiensi pasar dan inklusivitas pembangunan. Peningkatan pada IP-TIK mencerminkan sejauh mana masyarakat di berbagai provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses pasar, memangkas biaya transaksi ekonomi, serta menciptakan peluang usaha baru secara mandiri. Oleh karena itu, variabel ini dimasukkan untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat daerah telah mampu bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dengan demikian, tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat karena dapat memengaruhi produktivitas, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan IP-TIK terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel pembangunan dengan kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan tingkat kemiskinan penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024 dengan menggunakan data 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini tidak memasukkan empat provinsi baru hasil pemekaran di wilayah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Hal tersebut dikarenakan data statistik pada keempat provinsi tersebut belum tersedia

secara lengkap dan konsisten untuk seluruh periode pengamatan 2015-2024. Oleh karena itu, penggunaan 34 provinsi dinilai lebih tepat untuk menghasilkan data panel yang seimbang (*balanced panel*) sehingga hasil estimasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan dapat dibandingkan antarwaktu maupun antarprovinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024.

4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peran variabel makroekonomi dan aspek teknologi dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan transformasi digital.